

## Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

**Ahmad Yasir**

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail:  
yasirahmad200981@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Village Funds originate from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and are utilized for development and welfare, particularly in rural areas. Village Funds are expected to have a highly positive impact on infrastructure development. However, in reality, many community facilities, such as village roads, cannot yet be considered adequate, which may disrupt daily mobility or traffic flow for the community.*

*Using a qualitative approach, this study employs primary data obtained through direct interviews with informants and secondary data collected from the Mekar Sekuntum village office and the Central Statistics Agency of Sambas Regency. The analysis method involves calculating the effectiveness ratio to measure the level of effectiveness.*

*The results of this study indicate that the management of Village Funds sourced from the APBN is entirely used for village development to achieve national development goals. Village Funds are considered effective when they are utilized in accordance with the objectives of the Village Fund policy itself. Village Funds aim to realize development in villages.*

*Based on research conducted on the effectiveness of Village Fund policies in infrastructure development in Mekar Sekuntum Village, Tebas District, Sambas Regency, the management of Village Funds is declared compliant with the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2014 on Villages, Ministry of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 on Village Financial Management, and Sambas Regent Regulation Number 48 of 2018 on Village Financial Management.*

**Keywords:** *Village fund management, infrastructure development.*

### **ABSTRAK**

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan khususnya wilayah pedesaan. Dana Desa seharusnya mampu memberikan dampak yang sangat positif bagi pembangunan infrastruktur, tetapi kenyataannya masih banyak fasilitas masyarakat seperti jalan desa yang masih belum bisa dikatakan baik untuk sekarang yang dapat mengganggu mobilitas atau lalu lintas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data primer berupa wawancara langsung kepada narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari kantor desa Mekar Sekuntum dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan di dalam menganalisis yaitu perhitungan rasio efektivitas untuk mengukur tingkat efektivitas

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN digunakan sepenuhnya untuk

pembangunan desa demi tercapainya pembangunan nasional. Dana Desa dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Dana Desa ada untuk mewujudkan pembangunan - pembangunan di Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Bahwa pengelolaan Dana Desa dinyatakan telah sesuai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Kata Kunci:** Pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur.

## **PENDAHULUAN**

Dana desa sebagai kebijakan percepatan pembangunan (Putri et al., 2020) merupakan implementasi kebijakan dana desa yang tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan di kalangan penduduk setempat (Russell et al., 2023). Dengan mengalokasikan sumber daya keuangan langsung ke desa-desa dapat mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka, sehingga meningkatkan kepemilikan dan akuntabilitas dalam masyarakat. Selain itu pemanfaatan dana ini secara efektif (Wojtowicz, 2013) dapat mengarah pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada standar hidup yang lebih tinggi (Arif & Nasution, 2022).

Saat ini desa merupakan subjek pembangunan dan diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan dan sumber daya (Rimawan et al., 2020). Pergeseran ini tidak hanya memberdayakan pemerintahan lokal tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat, mendorong warga untuk mengambil inisiatif dalam mengatasi tantangan dan aspirasi mereka sendiri (Arifin et al., 2020). Selain itu, Keterlibatan antara pemerintah desa, otoritas kabupaten, dan masyarakat lokal sangat penting untuk pencapaian tujuan bersama, dan menjamin bahwa inisiatif pembangunan bersifat relevan dan berkelanjutan (Amin, 2020). Sehingga menumbuhkan transparansi dan kepercayaan, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan bahwa suara masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan (Ayumiati et al., 2019).

Pengelolaan dana desa yang efektif meliputi pembentukan pedoman yang jelas, audit rutin, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran untuk memastikan akuntabilitas dan menumbuhkan budaya kolaborasi (Zitri et al., 2020). Pembentukan pedoman yang jelas dapat memberikan arahan dan standar yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, sehingga prosesnya menjadi transparan dan terstruktur (Amin, 2020). Kemudian audit yang dilakukan secara berkala memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana. Sedangkan melibatkan masyarakat

dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kebutuhan prioritas desa (Ayumiati et al., 2019). Partisipasi masyarakat juga membantu menciptakan akuntabilitas dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama (Zitri et al., 2020).

Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur (Zitri et al., 2020). Pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sangat penting menjadi hal yang pokok agar pembangunan tidak terhambat. Ketersediaan pedoman dan regulasi yang jelas yang dapat membantu memandu pengelolaan dana desa. keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dana desa telah memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Fatah, 2018).

Infrastruktur yang memadai dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan fasilitasn sosial lainnya sehingga kualitas hidup meningkat (Suartha, 2012). Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat sejalan dengan perbaikan infrastruktur karena selain memfasilitasi kegiatan perdagangan, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan membuka peluang usaha baru, seperti pasar desa atau sektor pariwisata lokal juga membuka peluang kerja baru (Makalalag et al., 2017).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan beberapa infrastruktur yang belum cukup memadai, saluran pembuangan limbah rumah tangga yang belum baik (Fatah, 2018). Masih banyak pula jalan pemukiman warga yang dalam kondisi kurang baik dan jalan tersebut sering digunakan masyarakat dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. masyarakat setempat mengatakan bahwa kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana desa ini kebanyakan pengeloaan dana desa dipakai untuk peningkatan saja bukan langsung dengan pembangunan secara permanen contohnya seperti program peningkatan jalan hanya peningkatan bukan langsung dirabat beton kalau hanya peningkatan jalan akan cepat rusak karna tidak dikerjakan secara permanen seharusnya harus dipikirkan dengan baik sebelum perencanaan dan melaksanakan pembangunan (Susilowati et al., 2018).

Pengkajian efektivitas pengelolaan dana desa harus dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada solusi jangka panjang daripada perbaikan sementara. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan infrastruktur tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemajuan. Pengkajian tentang pengelolaan dana desa di Indonesia telah banyak dilaksanakan. Namun lebih konsen kepada kajian normatif (Zitri et al., 2020) untuk penelitian ini dilakukan dengan melihat secara langsung di lapangan (studi empiris) pada Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa agar dapat menunjang infrastruktur yang memadai bagi masyarakat desa. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mendesripsikan, mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan infrastruktur di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif penelitian yang dimana temuan-temuannya tidak diperoleh dari hasil statistik (J Moleong, 2012). Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, perilaku, kepercayaan, persepsi serta orang secara individual maupun kelompok (J Moleong, 2012). Penelitian ini akan menggambarkan dengan sesungguhnya fenomena atau fakta-fakta di lapangan yang dapat bersifat alamiah atau rekayasa manusia karena penelitian ini mempelajari bentuk, aktivitas, ciri, perubahan, korelasi, kesamaan dan perbedaannya menggunakan fenomena lain (Sukmadinata, 2007).

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu penetapan informan yang dapat memberikan informasi dalam penelitian (Sugiarto, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Ketua Gapoktan dan masyarakat. Peneliti menetapkan informan tersebut berdasarkan pertimbangan informan yang sesuai dengan objek yang akan diteliti dan anggapan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang sesuai dengan objek penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teknik observasi untuk melihat dan mengamati secara langsung lingkungan dan sarana prasarana serta infrastruktur di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan yang dianggap mengetahui tentang objek yang diteliti untuk memperoleh informasi yang akurat.

Teknik wawancara yang dilakukan dengan pertemuan secara langsung terhadap informan. Wawancara terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala BPD tersebut dilakukan untuk mengetahui prosedur pengelolaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban serta data lainnya berupa hardcopy yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa atau data lainnya. Wawancara terhadap Ketua Gapoktan dan masyarakat bertujuan untuk mengetahui keterlibatan dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Guna menunjang dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan instrumen sebagai alat bantu (Arikunto, 2000) antara lain peneliti sendiri (human instrument), lembar observasi, lembar wawancara, dan smartphone.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif dengan melakukan wawancara. Prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah jenis analisis data yang digunakan untuk memilih, memilah, membuang, dan menyusun data sehingga didapatkan kesimpulan yang

diverifikasi (Juansah, D. E., & Emzir, 2016). Reduksi data dapat disebut dengan merangkum dan memilih hal-hal penting atau pokok-pokok dari objek yang diteliti. Data yang telah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan diagram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, efektivitas menjadi indikator seberapa baik pekerjaan yang dilakukan ataupun sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Masruri, 2014). Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya dapat dikatakan efektif. Dengan demikian untuk menganalisis Efektivitas Dana Desa dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan Pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria rasio efektivitas yang digunakan sebagai berikut:

| Rasio Efektivitas | Persentase (%) |
|-------------------|----------------|
| 1. Sangat Efektif | >100%          |
| 2. Efektif        | 90% - 100%     |
| 3. Cukup Efektif  | 80% - 90%      |
| 4. Kurang Efektif | 60% - 80%      |
| 5. Tidak Efektif  | <60%           |

Sumber: Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi ketiga tahun 2007*

Berikut tabel hasil perhitungan dari efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Mekar Sekuntum.

### Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Desa Mekar Sekuntum

Tahun 2020-2021  
(Dalam Jutaan Rupiah)

| Tahun | Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur |                  | Tingkat Efektivitas (%) |
|-------|---|------------------|-------------------------|
|       | Anggaran                                  | Realisasi        |                         |
| 2020  | 294.134.767,27                            | 284.743.072,27   | 96,80<br>(Efektif)      |
| 2021  | 203.783.266,41                            | 203.783.250,00   | 99,99<br>(Efektif)      |
| 2022  | 1.235.218.848,14                          | 1.197.553.929,46 | 96,95<br>(Efektif)      |

Dana Desa yang digunakan dalam bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian pada tahun 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Dana Desa yang digunakan dalam bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dinyatakan efektif berdasarkan rasio perhitungan efektivitas dengan hasil 96,80% untuk tahun 2020, 99,99% untuk tahun 2021 dan 96,95% untuk tahun 2022.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN digunakan sepenuhnya untuk pembangunan desa demi tercapainya pembangunan nasional. Setiap tahun, 30% dari Dana Desa digunakan untuk operasional sedangkan sisanya 70% digunakan untuk pembangunan. Dana Desa dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Dana Desa ada untuk mewujudkan pembangunan - pembangunan di Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, ditemukan beberapa informasi yang mampu menjelaskan bagaimana Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa tersebut. Untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator dari pendapat Matlan (2008).

Tepat kebijakan dalam suatu efektivitas kebijakan dapat diartikan sebagai tolak ukur bagaimana suatu kebijakan tersebut dinilai apakah benar-benar diperlukan untuk publik (masyarakat) atau tidak. Seperti halnya dalam kebijakan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang terkait tentang dana desa. Kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang ada. Dengan demikian adanya kebijakan pemerintah terkait dana desa diukur dari ketepatan kebijakan, maka dana desa merupakan kebijakan yang dinilai tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang terjadi di Desa Mekar Sekuntum, pembangunan yang mulai digencarkan sudah bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Desa Mekar Sekuntum, sehingga akses-akses tertentu yang dibutuhkan masyarakat bisa dengan mudah didapatkan.

Indikator kedua dalam melihat suatu efektivitas kebijakan yaitu melihat apakah pelaksanaannya sudah tepat atau tidak. Ketepatan pelaksanaan dapat diartikan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut terdiri atas pemerintah, swasta dan masyarakat, maksudnya adalah bahwa implementer kebijakan bukan hanya dari pihak lembaga pemerintah saja, ketepatan pelaksanaannya melibatkan tiga pihak tersebut.

Dalam ketepatan pelaksanaan, implementer kebijakan dana desa ini dibagi atas tupoksmasing-masing dibidang pembangunan, meskipun tujuan dari dana desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan disini bukan diartikan sebagaipembangunan infrastruktur saja, pembangunan ini terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dalam bentuk fisik yang membantu dan mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat desa dapat dibina dan dibangun agar tercipta individu dan masyarakat yang mandiri. Pembangunan infrastrktur berupa pembangunan fisik melalui jalan, drainase, rabat beton, aspal tani, pembangunan masjid, pembuatan jembatan dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan sosialisasi, pembelajaran topik tertentu yang dapat diaplikasikan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dalam ketepatan pelaksanaannya, implementor dari dana desa diukur dari bagaimana kerjasama antara pemerintah desa, swasta dan masyarakat.

Aspek ketiga yakni ketepatan target pencapaian suatu perencanaan. Ada dua hal yang dijadikan sebagai tolak ukur yaitu apakah target sesuai dengan yang direncanakan, kesiapan dari semua pihak serta ada atau tidaknya konflik bahkan harmoni, artinya yaitu, adakah sebuah penolakan atau tidak. Pertama, apakah target telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Telah diketahui bahwa target dari adanya kebijakan terkait dana desa adalah pemerataan pembangunan. Di Desa Mekar Sekuntum sendiri tempat peneliti melakukan wawancara, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam membantu dan memudahkan warga dalam kegiatan sehari-harinya sehingga dengan melalui perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Mekar Sekuntum dihasilkan beberapa target perencanaan pembangunan yang sudah sebagian terlaksanakan dan ada juga sebagian yang dibangun kedepannya yaitu pembangunan jalan, drainase, pembangunan masjid, pembuatan jembatan, pembuatan rabat beton, pembuatan aspal tani, pembuatan gorong-gorong.

Tolak ukur kedua dalam melihat ketepatan target adalah bagaimana kesiapan dari semua pihak serta ada atau tidaknya konflik bahkan harmoni. Artinya adalah bagaimana penerimaan kepada masyarakat Mekar Sekuntum dengan adanya kebijakan dana desa ini. Penerimaan tersebut maksudnya adalah apakah masyarakat Mekar Sektuntum mendukung atau menolak pembangunan yang akan dilakukan. Akan tetapi, dalam keberjalanan kebijakan dana desa ini menunjukkan hasil positif. Menurut informasi yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa pihak-pihak yang ada di Desa Mekar Sekuntum termasuk masyarakat yang

mendukung terkait pembangunan yang akan dilakukan. Dari pernyataan di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Mekar Sekuntum sangat mendukung dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Mekar Sekuntum. Tidak ada konflik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, dukungan masyarakat ini membuat pelaksanaan pembangunan juga lancar dan lebih cepat terlaksana.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pengukuran rasio efektivitas, secara akumulatif efektivitas pengelolaan dana desa dari tahun 2020- 2021 di kategorikan efektif dan sangat efektif dengan rentang nilai 99,99% (Tahun 2020) dan 100% (Tahun 2021). Untuk Pembangunan Infrastuktur yang di ukur dari tahun 2020-2022 juga dinyatakan efektif dengan hasil 96,80% (tahun 2020),99,99% (tahun 2021) dan 96,95% (tahun 2022).

### **Saran**

Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat terhadap Dana Desa agar pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Serta diharapkan juga untuk Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa untuk lebih peka dan tanggap terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat untuk terciptanya kemajuan dan pembangunan desa yang lebih baik lagi. Sedangkan masyarakat harus bisa mendukung terhadap kebijakan yang menjadi program pemerintah desa dan lebih aktif memberikan masukan ketika mengikuti musyawarah desa demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, S. (2020). Do the village fund management influence on the economic development of the village. <https://doi.org/10.30998/JABE.V7I1.6997>
- Arif, M., & Nasution, S. A. (2022). The Role of Grants in Infrastructure Development Efforts. <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.548>.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/J.JRURSTUD.2020.08.052>.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta.
- Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. <https://doi.org/10.35870/EMT.V3I2.99>.
- Fatah, Z. (2018). DAMPAK DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA ( Studi Di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang). <https://doi.org/10.30762/ASK.V2I2.850>
- J Moleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Juansah, D. E., & Emzir, E. (2016). The Implementation of cooperative principle in class group discussion. *IJLECR (International Journal Of Language Education and Culture Review)*, 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.21009/IJLECR.021.03>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. <https://doi.org/10.35800/JJS.V8I1.15334>
- Masruri. (2014). *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Akademia Permata.
- Putri, C. T., Wardiyanto, B., & Suaedi, F. (2020). Policy evaluation of village fund through an agro-tourism village for sustainable local development. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/MKP.V33I22020.174-183>
- Rimawan, M., Alwi, A., Ismunandar, I., & Aryani, F. (2020, August 28). Village Fund Allocation on Economic Growth, Human Development Index and Poverty. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200827.085>
- Russell, K., Rosenbaum, S., Varela, S., Stanton, R., & Barnett, F. (2023). Fostering community engagement, participation and empowerment for mental health of adults living in rural communities: a systematic review. *Rural and Remote Health*. <https://doi.org/10.22605/RRH7438>
- Suartha, N. (2012). *Esensi Bantuan Pemerintah Kabupaten Badung Terhadap Keberdayaan Masyarakat*. Piramida.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif*. Suaka Media.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*.

- Remaja Rosdakarya. Susilowati, N., Herdiani, A., & Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/KSS.V3I10.3190>
- Wojtowicz, D. (2013). The Purposefulness and Effectiveness of Supporting Entrepreneurship with Public Funds - EU Funds for the Development of Self-Employment and Startups. *Management and Business Administration. Central Europe*. <https://doi.org/10.7206/MBA.CE.2084-3356.81>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://doi.org/10.47650/JGLP.V2I2.60>